

BAB II

REPUBLIK SUDAN

A. Gambaran Sudan secara Umum

Republik Sudan ditinjau dari segi geografisnya, merupakan negara terluas di Afrika yang memiliki luas sekitar 2.505.810 km². Terletak di Afrika Utara dan beribukotakan Khartoum. Sudan berbatasan dengan Mesir di utara, Eritrea dan Ethiopia di timur, Kenya dan Uganda di tenggara, Kongo dan Republik Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, dan Libya di barat laut. Sudan meliputi daratan yang sangat luas dengan gurun sahara di sebelah utara, daerah pengunungan di wilayah Sudan Timur, dan Barat, serta rawa-rawa dan hutan hujan tropis yang sangat besar di daerah Selatan.

Populasi penduduk Sudan merupakan populasi yang paling berbeda dengan negara-negara lain di benua Afrika. Hal ini dikarenakan adanya dua kebudayaan besar yaitu Arab dan orang Afrika berkulit hitam, dengan ratusan kelompok etnis, suku dan bahasa. Penduduk Sudan berasal dari berbagai macam kelompok etnis yang berbeda, yaitu etnis Afrika sebesar 52 %, Arab 39 %, Beja 6%, dan lain-lain sebanyak 3 %. Penduduk di wilayah utara Sudan mayoritas memeluk agama Islam (70%), sebanyak 5% memeluk agama Kristen dan kebanyakan berdomisili di selatan Sudan, sementara 25 % penduduk lainnya masih memegang teguh kepercayaan asli. Sebagian besar masyarakat Sudan berbahasa Arab. Penduduk di wilayah utara Sudan memeluk agama Kristen, seperti Nubian

Beja, Ta Bedawie, Fur, Nuban, dan juga dialek Nilotic dan Nilo-Hamitic. Populasi penduduk Sudan hingga Juli 2008 diperkirakan sebesar 40.218.455.¹⁷

B. Sudan Selatan

Sudan Selatan, secara resmi bernama Republik Sudan Selatan, adalah sebuah negara di Afrika Timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Juba, terletak di negara bagian Khatulistiwa Tengah sebelah selatan. Negara terkurung daratan ini berbatasan dengan Ethiopia di sebelah timur; Kenya, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo di sebelah selatan; Republik Afrika Tengah di sebelah barat; dan Sudan di sebelah utara. Sudan Selatan meliputi kawasan rawa yang luas, Sudd, yang dibentuk oleh Nil Putih, secara lokal disebut Bahrul Jabal.

Negara ini awalnya merupakan bagian dari Sudan Anglo-Mesir, kondominium Britania dan Mesir, dan kemudian menjadi bagian dari Republik Sudan ketika mencapai kemerdekaan pada 1956. Setelah Perang Saudara Sudan Pertama, Wilayah Otonomi Sudan bagian Selatan dibentuk pada 1972 dan berlangsung sampai dengan 1983. Kemudian terjadi Perang Saudara Sudan Kedua yang berakhir dengan Perjanjian Damai Komprehensif 2005. Selanjutnya pada tahun itu, otonomi selatan dikembalikan ketika Pemerintah Otonomi Sudan bagian Selatan dibentuk. Sudan Selatan menjadi sebuah negara merdeka pada 9 Juli 2011 tengah malam (00:00) waktu setempat setelah referendum yang diselenggarakan

¹⁷ CIA fact book: Sudan Country profile. <http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html>. Diakses tanggal 5 Juni 2011.

pada Januari 2011 menghasilkan sekitar 99% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Sudan.

Pada 14 Juli 2011, Sudan Selatan menjadi negara anggota PBB. Negara ini juga merupakan anggota Uni Afrika. Sudan Selatan juga telah mendaftarkan diri untuk bergabung dengan Persemakmuran, Komunitas Afrika Timur, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Negara ini juga dinyatakan dapat mendaftarkan diri untuk keanggotaan Liga Arab.¹⁸

C. Peristiwa-Peristiwa Penting dalam Sejarah Sudan

Untuk mengetahui waktu dan beragam peristiwa serta konflik di Sudan, perlu adanya suatu alur beragam peristiwa penting dalam sejarah Sudan dengan tujuan memudahkan kronologi dan pemahaman. Selain kronologi yang dimaksud, perang sipil satu dan dua di Sudan dibahas sedetail mungkin disebabkan peristiwa inilah yang paling banyak disoroti dan berpengaruh di Sudan dan mata dunia yang pada akhirnya berujung pada diadakannya pengambilan keputusan dalam sistem politik Pemerintah Sudan dengan menempuh referendum kemerdekaan di wilayah Sudan bagian selatan.

1. Pra kemerdekaan

Selagi Sudan utara secara tradisional telah terikat dengan budaya Muslim Arab dan diuntungkan dari penghasilan rata-rata perkembangan yang lebih tinggi, bagian Selatan tetap saja secara perbandingan lebih miskin dan terdiri dari penganut Kristen dan penduduk Afrika yang beragam.

Pada masa kekuasaan *Anglo-Egyptiandi* Sudan (1899-1953) diperkuat dan dikukuhkan pembagian menurut sejarah antara Utara dan Selatan. Selama periode ini, Sudan dikelola oleh seorang gubernur-jenderal yang diangkat oleh Mesir dengan persetujuan Britania. Nyatanya, Sudan masih diatur dalam sebuah koloni British. Wilayah utara dan selatan disatukan ke dalam daerah administrative tunggal, tanpa adanya perundingan dengan penghuni wilayah selatan yang takut dicaplok oleh kekuatan politis Utara yang lebih besar. Perkembangan ekonomi secara umum terjadi di area Lembah Sungai Nil di utara, yang semakin membagi kedua daerah tersebut.

Setelah adanya perjanjian pada Februari 1953 oleh UK dan Mesir untuk mengabdikan kemerdekaan Sudan pada 1956, ketegangan internal antara Utara dan Selatan meningkat.¹⁹

Pada saat kemerdekaan semakin mendekat dan nampaknya para pemimpin wilayah utara tidak memegang komitmennya untuk menciptakan sebuah pemerintah federal yang akan memberikan Selatan otonomi yang substansial, *Equatoria Corps* – sebuah unit militer dibentuk yang berasal dari orang-orang selatan – melakukan pemberontakan. Meski pemberontakan ini mudah ditumpas, mereka yang selamat melarikan diri ke kota-kota dan memulai membentuk kelompok pemisah yang tidak terorganisir.

2. Paska Kemerdekaan

Setelah merdeka pada tahun 1956, alur sejarah penulis rangkum sebagai berikut:

¹⁹*Case Study Series: Race and Religion in Civil War*, Berkley Centre for Religion, Peace, and

Berikut kronologi peristiwa-peristiwa penting di Sudan²⁰:

- i. 1956 Sudan memperoleh kemerdekaanya
- ii. 1969 terjadi kudeta yang membawa Jaafar Muhammad el-Nimeiri berkuasa.
- iii. 1972 konferensi *Addis Ababa* mengakhiri perang sipil. Sudan Selatan memperoleh status otonominya.
- iv. 1983 Shari'a (Hukum Islam) diperkenalkan. Pemerintah Sudan selatan yang bersatu dipecah menjadi pemerintahan propinsi, perang antara SPLM/A dan pemerintah pusat berlangsung, John Garang sebagai pimpinan SPLM/A.
- v. 1985 Nimeiri diberhentikan.
- vi. 1986 pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Umma Party membentuk pemilu
- vii. 1989 kudeta menjadikan Omar al-Bashir berkuasa.
- viii. 1994 IGAD menyetujui suatu deklarasi prinsip-prinsip guna resolusi konflik di Sudan
- ix. 2001 duta perdamaian AS, John Danforth diberangkatkan ke Sudan, memperbaharui perjanjian AS.
- x. 2002 terdapat komisi perjanjian US antara SPLM/A dan Pemerintah Sudan diberbagai aspek konflik. Mendukung IGAD yang mulai mengadakan negosiasi yang lebih luas selama tiga tahun yang menuju pada CPA.

xi. 2003 sejalan dengan perkembangan negosiasi di Kenya antara pemerintah pusat dan selatan – ketegangan sengit yang berlangsung di Darfur yang selanjutnya berubah menjadi pemberontakan berskala penuh

xii. 2005 NCP dan SPLM/A menandatangani CPA di Nairobi, Kenya. John Garang disumpah sebagai wakil presiden pertama Sudan (pada 9 Juli); ia terbunuh bulan berikutnya melalui kecelakaan helikopter, dan digantikan wakil presiden pertama Salva Kiir Mayardit. Pembagian kekuasaan Persatuan Nasional dibentuk. Pemerintah Otonomi Sudan Selatan dibentuk. Dewan Keamanan PBB menyerahkan situasi di Darfur kepada ICC. *Interim National Constitution dan Interim Constitution Sudan Selatan* disetujui.

xiii. 2006 SLM/A (Minnawi) menandatangani *Darfur Peace Agreement* dengan pemerintah pusat; JEM dan SLM/A (Abdel Wahed) tidak ikut menandatangani. Pemberontak *Eastern Front* menyetujui *Eastern Sudan Peace Agreement* dengan jenderal pemerintah pusat.

xiv. 2007 SPLM sejenak menunda partisipasinya dalam *Government of National Unity*.

xv. 2008 sensus nasional digagas. Pemberontak JEM dari Darfur maju ke Khartoum. Pertempuran antara SPLA dan SAF terjadi di wilayah Abyei

xvi. 2009 ICC mengeluarkan surat penahanan kepada Presiden al-Bashir dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sensus diselesaikan (baru akan diselesaikan hingga Juli 2007). Pertempuran antara SPLA dan SAF terjadi Malakal. *Permanent Court of Arbitration* di Hague

pertama ditolak. Undang-undang Referendum Sudan Selatan (*Southern Referendum Law*), Undang-undang Referendum *Abyei Referendum Law* dan Perundingan Hukum Umum (*Law Popular Consultations*) diloloskan.

xvii. 2010 Perbatasan Utara-Selatan akan didemarkasi (baru akan didemarkasi pada Juli 2005). Bulan April – pemilu akan digelar (baru digelar pada Juli 2009).

xviii. (Feb) 2010: Suatu usulan pengadilan ICC memutuskan bahwa dakwaan sebelumnya yang menuntut adanya genosida yang tidak dapat diberikan kepada al-Bashir, ternyata keliru. Kasus kembali digelar guna suatu keputusan yang menuntut al-Bashir dengan dakwaan genosida.

xix. (Apr) 2010: Pemilu nasional menjadikan Al-Bashir sebagai Presiden Sudan, dan Salva Kiir sebagai Presiden Sudan Selatan. Partai oposisi meminta voting ulang.

xx. (Des) 2010: terjadi suatu peningkatan pertempuran di Darfur akibat gencatan senjata antara SLA dan pemerintah dilanggar. Diikuti berakhirnya pembicaraan damai di Doha.

xxi. (Jan) 2011: dengan lebih dari 99% setuju, Sudan Selatan memberikan suara kepada kemerdekaan dalam suatu pemberian suara yang dianggap sangat adil, bebas dan dapat dipercaya.

xxii. (5 Juni) 2011: bentrokan mulai terjadi di Kordofan Selatan

xxiii. (Juli) 2011: Pembentukan South Sudan Liberation Army (SSLA)

D. Perang Sipil sebagai bagian dari upaya Pemberontakan Sudan bagian Selatan

Proses pemberontakan-pemberontakan di Sudan terangkum dalam perang sipil yang melanda Sudan bagian selatan. Perang sipil ini terbagi ke dalam dua periode.

1. Perang Sipil Pertama (1955-1972)

Perang Sudan antara Utara dan Selatan pertama kali terjadi pada Agustus 1955, hanya empat bulan sebelum kemerdekaan dikumandangkan pada 1 Januari 1956. Disisilain perang ini merupakan perang agama (Utara Islam, Selatan Kristen/Anismis) dan ras (Utara Arab, Selatan Afrika). Sebaliknya, antagonisme dan motivasi konflik berakar dalam sejarah marginalisasi dan eksploitasi ekonomi dan politik Selatan. Percecokan atas hak Selatan telah memperluas permusuhan menjadi semakin intensif, dan pada akhirnya menjadikan penyatuan semakin sulit, bahkan mungkin tidak mungkin.

Perbedaan antara Sudan Selatan dan Utara sebenarnya berawal dari masa penjajahan Mesir di Sudan pada abad ke-19. Dimana warga berkulit hitam seringkali dijadikan sebagai budak. Perbedaan serta jarak kesetaraan hak antara warga Arab dan kulit hitam kemudian diperlebar setelah masa penjajahan Inggris dan Mesir, dimana diskriminasi tersebut terus-menerus berlanjut. Setelah Februari 1953, diputuskan bahwa Sudan berhak atas kemerdekaan. Hal ini dilanjutkan oleh transisi kekuasaan pertama melalui pemilihan anggota parlemen tahun 1954.²¹

²¹Sudan - First Civil War. www.globalsecurity.org/military/world/wwar/sudan-civil-war1.htm

Partai-partai politik pun bermunculan. NUP (National Union Party) yang anggotanya mayoritas merupakan warga dari Sudan Utara, dan juga Liberal Party yang anggotanya mayoritas merupakan warga dari Sudan Selatan, merupakan beberapa contoh partai politik yang ikut bersaing dalam pemilihan tersebut. Hasilnya, mayoritas parlemen diduduki oleh anggota NUP, partai politik yang begitu menerapkan ideology *anti-unionist* (berdiri sendiri, dan tidak ingin adanya integrasi dengan partai politik lainnya).

Melihat keadaan tersebut, anggota *Liberal Party* yang terpilih dalam parlemen berusaha mengusulkan sebuah pemerintahan federal, yang memberikan Sudan Selatan administrative yang berbeda dengan Sudan Utara. Hal tersebut merupakan upaya Sudan Selatan dalam membentuk sebuah pemerintahan yang benar-benar tidak diskriminatif, dan berusaha memperbaiki keadaan warga negara yang berada di Sudan Selatan. Usulan tersebut mendapatkan tanggapan yang positif oleh anggota parlemen lainnya, termasuk mayoritas anggota dari NUP. Namun, ternyata tanggapan positif tersebut hanya sebagai janji yang tidak mungkin terealisasi. Janji dengan harapan akan mendapatkan suara dan dukungan dari rakyat Sudan Selatan.

Departemen pemerintahan serta posisi-posisi tinggi daerah di Sudan Selatan banyak diduduki oleh warga Sudan Utara. Dari sini-lah banyak kecurigaan bahwa pemerintahan yang baru saja terbentuk, berusaha menyebarkan kekuasaannya, Sudan Selatan termasuk dalam cakupannya. Seiring dengan waktu, di level nasional posisi-posisi tinggi dalam militer, administrasi, serta kepolisian diduduki oleh warga negara Sudan Utara.

Mengatasi kemungkinan pemerintahan yang dikendalikan oleh Sudan Utara, maka mulai-lah banyak gerakan bermunculan, berusaha menentang sistem pemerintahan yang terjadi pada saat itu. Menuntut kesetaraan suara politik, dan berharap agar aspirasi mereka akan pemerintahan federal dapat dijadikan konsiderasi. Namun awal mula konflik terjadi adalah pada 18 Agustus 1955. Sebuah unit militer yang bernama *Equatoria Corps*. Yang terdiri atas warga negara Sudan Selatan, menolak untuk mematuhi perintah dari pemerintah saat itu, yaitu Al-Azhari.²² Gerakan tersebut telah menewaskan begitu banyak pejabat dari Sudan Utara, termasuk dari militer dan kepolisian.

Bentuk kekecewaan akan pemerintahan pusat tersebut bukannya memperlambat ataupun menunda kemerdekaan, namun malah mempercepat prosesinya. Inggris merasa berasa dalam posisi yang tidak mampu untuk memperbaiki kekacauan yang terjadi, sehingga memiliki insentif yang besar untuk memberikan Sudan kemerdekaannya. Bahkan di saat dimana belum ada kesepakatan masalah konstitusi dasar negara yang ditetapkan oleh parlemen. Sehingga kemerdekaan dipercepat, pada tanggal 1 Januari 1956.

Namun kemerdekaan ternyata tidak membawa Sudan pada kesatuan negara yang lebih utuh. Pasukan pemberontak dari *Equatoria Corps*/ gerakan yang biasa disebut *The Torit Mutiny*, ternyata bukanlah gerakan pemberontakan yang berlangsung selama berminggu-minggu saja. Memang benar bahwa gerakan pemberontakan di tahun 1955 tersebut berskala kecil, dan tidak membawa dampak/ perubahan yang signifikan di Sudan, namun gerakan tersebut telah

²² Douglas HJohnson, *The Root Causes of Sudan's Civil war*, Kampala: The international African institute. 2003. Hal. 28.

memberikan inspirasi bagi warga negara Sudan di bagian Selatan untuk ikut serta dalam gerakan pemberontakan tersebut. *The Torit Mutiny* telah memberikan refleksi bahwa mayoritas Sudan Selatan tidak menyetujui sistem pemerintahan yang diaplikasikan saat itu. Berusaha memperlihatkan kepada bukan hanya Sudan Utara, tetapi kepada seluruh dunia bahwa mereka tidak ingin terjadi kesatuan politik antara Sudan Selatan dan Sudan utara, bahkan sejak kemerdekaan.²³

Nampaknya gerakan pemberontakan *The Torit Mutiny* ini telah membangkitkan kesadaran warga negara Sudan di Selatan bahwa mereka tidak diberikan hak yang sama dalam pemerintahan Sudan secara keseluruhan. Sehingga pemberontakan pertama ini telah dengan sukses memunculkan gerakan-gerakan pemberontakan lainnya di daerah Selatan. Gerakan pemberontakan telah membesar membentuk kelompok pemberontak yang terdiri atas gerakan pemberontakan pertama di Torit, serta pelajar dari Sudan Selatan yang juga ingin berpartisipasi dalam pemberontakan tersebut. Kelompok ini-pun membentuk pasukan gerilya *Anyanya Nya*. Dari hal tersebut, gerakan pemberontakan *The Torit Mutiny* menjadi sumber perang sipil pertama di Sudan, atau yang biasa disebut sebagai perang *Anyanya* pertama.²⁴

Arti nama *Anyanya Nya* adalah Ular berbisa. *Anyanya Nya* merupakan sebutan dari para pemberontak yang berusaha melawan pemerintahan pusat (yang dikuasai Sudan Utara saat itu). Berbeda dengan *The Torit Mutiny*, *Anyanya Nya* ini melakukan operasi pemberontakan dalam skala yang lebih besar, terdiri dari berbagai etnis

²³*Focus On South: Jaafar Nimeiri, the Untrustworthy President.* www.sudanvisiondaily.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3171. Diunduh pada 12 Februari 2012.

²⁴*South Sudan celebrates the first rebellion, the Torit Mutiny.* www.sudantribune.com/South-

dari Sudan Selatan, serta persenjataan yang lebih mendukung. Pada saat gerakan pemberontakan di Torit tahun 1955, persenjataan sangat terbatas. Mayoritas dicuri dari departemen kepolisian Sudan, ditambah operasi yang biasa hanya dilakukan di daerah hutan dan tempat-tempat yang tersembunyi. Sehingga gerakan pemberontakan oleh Anya Nya ini jauh apabila dibandingkan dengan sebelumnya.

Pasukan persenjataan Anya Nya banyak dibantu oleh konflik yang terjadi di luar Sudan. Pada tahun 1965, negara-negara Arab, serta Afrika menunjukkan dukungannya terhadap gerakan *Simba* di Kongo. Persenjataannya pun dikirim lewat jalur daratan. Namun persenjataan yang diharapkan jatuh ke tangan gerakan *Simba*, malah jatuh ke tangan pasukan pemberontakan Anya Nya. Gerakan pemberontakan ini telah berlangsung selama beberapa tahun, yakni dari tahun 1963-1969.²⁵

Begitu banyak pergerakan pemberontakan yang berlangsung saat itu, menentang pemerintahan yang didominasi oleh Sudan Utara, sehingga beragam kelompok gerakan pemberontakan tersebut tidak mewakili satu suara. Sehingga upaya negosiasi yang dilakukan selalu gagal, sebab adanya perbedaan pendapat, ataupun latar belakang etnis yang menghambat prosesi negosiasi. Sehingga di pada Januari 1971, mantan letnan tentara Sudan, Joseph Lagu mengumpulkan dan menyatukan semua kelompok gerakan pemberontakan kedalam sebuah gerakan yang disebut SSLM (Southern Sudan Liberation Movement) atau disebut Gerakan pembebasan Sudan Selatan. Ini adalah pertama kalinya struktur komando

terstruktur untuk pencapaian tujuan yang sama. Alhasil gerakan ini melakukan berbagai macam negosiasi dengan pihak pemerintahan pusat untuk mencapai sebuah perjanjian yang dapat disepakati bersama.

Pembentukan SSLM ini memberikan kekuatan yang baru bagi gerakan pemberontakan. Tersedianya pasukan persenjataan, dan perluasan operasi yang dilaksanakan telah merefleksikan kekuatan militer yang patut diperhitungkan. Dengan adanya struktur komando yang lebih jelas, strategi, serta gerakan yang dilakukan para pemberontak semua terstruktur, dan semakin menekan pemerintahan pusat untuk mengapresiasi suara dari Sudan Selatan. Pada akhirnya, SSLM diakui sebagai organisasi yang masuk dalam aktor negosiasi, menunjukkan bahwa SSLM telah memberikan kemajuan dalam pergerakan pemberontakan yang telah berlangsung sejak tahun 1955.

Tertekan oleh gerakan pemberontakan yang terjadi di daerah Sudan Selatan, maka di tahun 1972, dibuatlah perjanjian antara pemerintahan pusat dan SSLM (*Southern Sudanese Liberal Movement*). Perjanjian ini disebut sebagai *The 1972 Addis Ababa Agreement*, ditandatangani oleh presiden Sudan saat itu (Presiden Jafaar Muhammad An-Numeiry) dan Joseph Lagu dari Anya Nya, yang pada akhirnya membawa akhir dari perang sipil pertama di Sudan (1955-1972).²⁶

Perjanjian Addis Ababa bertujuan untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama 17 tahun. Saat perang sipil yang terjadi saat itu menelan begitu banyak korban, serta menghabiskan sumber daya Sudan Utara yang tergolong banyak, saat itulah pemerintahan pusat ingin melakukan negosiasi

²⁶ 1972 Addis Ababa Agreement (for the Sudan).

dengan pihak gerakan pemberontakan. Sebagai *bargaining power*, perjanjian ini memberikan Sudan Selatan otonomi daerah, yaitu otoritas untuk menjalankan pemerintahan di daerah tersebut.

Perdamaian terjadi selama beberapa tahun. Namun perjanjian Addis Ababa ternyata merupakan solusi jangka pendek dari konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Integrasi yang dipaksakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Banyak permasalahan yang muncul setelah perjanjian Addis Ababa ini. Integrasi unit militer nasional yang diusulkan menghasilkan banyak curigaan dan ketidakmampuan untuk saling percaya antara pasukan bersenjata Sudan Selatan dan Utara. Perkembangan ekonomi yang tidak setara juga mewarnai kegagalan integrasi negara Sudan.

Dalam perjanjian Addis Ababa, pasukan militer menjadi topik pembahasan utama, sebab berhubungan dengan keamanan negara. Pihak pemberontak dari SSLM menginginkan adanya 3 macam militer Sudan. Tentara Sudan Utara, Sudan Selatan, serta tentara nasional (yang terdiri dari pasukan kedua pihak). Hal ini diusulkan demi tetap menjaga keamanan dari Sudan Selatan, dari kemungkinan serangan dari Sudan utara. Karena tidak disepakati, maka diterapkanlah integrasi militer, dimana di kedua wilayah (Sudan Utara dan Sudan Selatan), akan terdiri dari jumlah pasukan yang seimbang jumlahnya, antara pasukan Sudan Utara dan Selatan.

Beberapa pasukan gerilya tidak menyetujui prasyarat tersebut. Sehingga kembali mengasingkan diri di daerah kehutanan Sudan Selatan. Pasukan Sudan

Kemungkinan ditugaskan ke Sudan Utara bisa berakibat fatal bagi keselamatan mereka. Sehingga beberapa pasukan lebih memilih jadi bagian unit pasukan pada saat perang sipil pertama Sudan. Pemikiran yang muncul tidak hanya itu, juga adanya rasa benci yang tetap membara dalam jiwa setiap pasukan gerilya tersebut. Semua permasalahan integrasi diatas sangat fatal dalam bidang militer, sebab konsentrasi tingkat tinggi akan selalu dibutuhkan, tanpa ada hambatan seperti ketidakpercayaan, atau bahkan rasa benci antar sesama pasukan dalam unit militer.

Dalam perjanjian Addis Ababa, proses integrasi militer ini berlangsung selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, integrasi militer tidak juga ditemukan. Bisa dilihat bagaimana masih banyak mantan pemberontak yang tidak diterima ataupun tidak mau menjadi bagian dari pasukan militer nasional, sehingga mengasingkan diri ke tempat yang tersembunyi. Kenyataan bahwa beberapa petinggi-petinggi pasukan gerilya mendapat jabatan yang rendah dalam pasukan militer nasional yang baru saja terbentuk juga telah mengurangi insentif para gerilya tersebut untuk ikut serta menjadi bagian dari militer. Jadi sangat jelas bahwa perjanjian Addis Ababa dari segi integrasi militer telah gagal, karena tidak memperhatikan unsure kebencian dan rasa curiga antar Sudan Selatan dan Utara yang telah berada dalam konflik internal selama 17 tahun.

Namun masalah yang juga muncul dalam perjanjian Addis Ababa adalah dari segi perkembangan Sudan Selatan pasca perjanjian. Dalam perjanjian, Sudan Selatan berhak atas otonomi daerah Sudan Selatan, yang berarti Sudan Selatan

sendiri, serta mendapatkan bantuan perkembangan berupa insentif finansial kepada Sudan Selatan. Tak satupun yang terealisasi.

Proyek perkembangan ekonomi yang telah dijanjikan oleh Sudan Utara gagal diaplikasikan pasca perjanjian Addis Ababa. Bahkan selama 11 tahun otonomi daerah tersebut, Sudan Selatan telah diabaikan oleh Sudan Utara untuk pemberian kesempatan perkembangan ekonomi yang setara dengan utara. Memang perkembangan ekonomi Sudan Selatan selama pasca perjanjian ditandatangani ada, namun tidak signifikan untuk proliferasi ekonomi domestik Sudan Selatan itu sendiri. Otonomi dalam bidang pendidikan, perkembangan regional, serta ekonomi telah membangkitkan amarah warga Sudan Selatan yang merasa ketidakadilan tetap terjadi.

Sistem otonomi daerah Sudan Selatan yang dijanjikan dalam perjanjian Addis Ababa ternyata berbeda dengan yang diharapkan oleh SSLM (*Southern Sudan Liberal Movement*). Yang diharapkan oleh pihak pemberontak adalah sistem federalisme sebagai bentuk negara Sudan, dimana nantinya pemerintahan baru Sudan Selatan memiliki hak untuk mengembangkan wilayahnya sendiri, dan menentukan beberapa kebijakan khusus Sudan Selatan. Hal ini untuk mengatasi beberapa kebijakan Sudan Utara yang tidak sepaham dengan Sudan selatan. Namun seiring dengan waktu, pemerintah pusat banyak melakukan intervensi pada sistem pemerintahan dan pembuatan kebijakan Sudan Selatan. Tidak memberikan bantuan perkembangan yang telah dijanjikan. Serta tidak diberikan

.

Berbicara mengenai intervensi pemerintahan pusat terhadap Sudan Selatan, tentunya tidak lepas dari sistem politik dalam Sudan Selatan itu sendiri. Perjanjian Addis Ababa membentuk sebuah dewan yang disebut Dewan Eksekutif Sudan Selatan, yang menjalankan sistem pemerintahan dalam otonomi daerah Sudan Selatan. Dalam pemilihan Ketua Dewan Eksekutif tersebut, seringkali terjadi intervensi dari pemerintahan pusat. Walaupun banyak menghadapi hambatan dalam pembentukan negara Sudan yang baru, setidaknya perjanjian Addis Ababa ini telah menghentikan perang sipil berskala besar, yang berlangsung 17 tahun.

2). Perang sipil kedua

Perang sipil kedua Sudan dimulai tahun 1983, disebabkan oleh realisasi perjanjian Addis Ababa yang tidak sesuai harapan masyarakat di Sudan Selatan. Dalam prakteknyadi mana pemerintahan pusat yang awal mulanya menjanjikan sebuah pemerintahan otonomi bagi Sudan Selatan, ternyata tidak menepati janji. Kasus intervensi dalam pemilihan umum, serta pengabaian terhadap perkembangan sosio-ekonomi di Sudan Selatan terjadi selama sebelas tahun penerapan perjanjian Addis Ababa. Seringkali pemerintahan pusat berencana mengakhiri perjanjian Addis Ababa. Jadi masalah pada perjanjian Addis Ababa bukan hanya terletak pada apakah perjanjian tersebut sudah dijalankan sesuai rencana atau tidak, tetapi juga pada bagian apakah ada konsistensi dalam mematuhi atau menjalankan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak pada tahun 1972.

Perjanjian Addis Ababa pada saat itu dimaksudkan memberikan harapan kepada rakyat Sudan Selatan akan perdamaian serta perkembangan sosio-

ekonomi daerah. Namun karena banyaknya pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pemerintahan pusat di Sudan Utara, meningkatkan minat warga Sudan Selatan untuk ikut serta sebagai pasukan gerilya menentang pemerintahan pusat.

Permasalahan integrasi militer kedua pihak yang gagal ikut masuk sebagai kegagalan dari perjanjian Addis Ababa. Sejak 1980an, jumlah tentara asal Sudan Utara yang berada di Sudan Selatan mulai meningkat, melebihi jumlah pasukan Sudan Selatan. Bertambahnya pelecehan oleh pasukan militer sudan Utara terhadap rakyat Sudan Selatan, serta bertambahnya pembunuhan, telah memperkuat refleksi bahwa integrasi antar kedua pihak tidak mungkin diaplikasikan saat ini, dan keharmonisan belum bisa terjadi pula.

Namun yang menjadikan momentum tetap untuk bangkitnya pergerakan pemberontakan tersebut adalah penyebaran Islam yang diaplikasikan oleh pemerintahan Numeiri di awal tahun 1980an. Walaupun Addis Ababa telah mengakhiri perang saudara selama beberapa tahun, namun penyebaran Islam di Sudan secara keseluruhan tidak pernah berhenti. Yang menjadi kontroversi utama adalah kebijakan pemerintahan Numeiri yang menerapkan Islamisasi (penyebaran agama Islam), termasuk dalam hukum yang disebut '*September law*'.

September law merupakan sebuah hukum yang menyebarluaskan ideologi Islam melalui pengaplikasian *Syariah Law* (Hukum Syariah).²⁷ Hukum syariah ini diaplikasikan bukan hanya di daerah Sudan Utara yang mayoritas penduduk adalah Islam, tetapi juga di Sudan Selatan, yang memiliki kepercayaan yang

²⁷ Dato-Woodward, *Sudan, 1980-1990: The Unstable State*, Boulder: Lynne Rienner, 1990

berbeda masalah agama. Melalui hukum syariah ini, ribuan hukuman pemukulan, amputasi, bahkan sampai eksekusi dilakukan oleh pihak yang berwenang, sebab melakukan kejahatan yang dilarang oleh agama Islam.²⁸

Hukum Syariah ini mendapatkan banyak protes bukan hanya dari mayoritas non-Muslim di daerah Sudan Utara, tetapi juga pada komunitas Muslim sekular yang ada di Sudan utara. Namun penerapan Hukum Syariah ini tidak pernah dihentikan. Semua gerakan yang menentang hukum yang kontroversial tersebut diabaikan. Bahkan pemerintahan-pemerintahan selanjutnya tidak pernah menghapuskan Hukum Syariah, hanya mengubah metode pengaplikasian dari Hukum Syariah tersebut.

Lanjutan perang saudara pertama di tahun 1955 sudah dapat diperkirakan pada saat itu. Adanya ketidakpercayaan yang terus-menerus lanjut terhadap pemerintahan pusat sejak pengaplikasian perjanjian Addis Ababa, Integrasi militer Sudan Utara dan Selatan yang dipaksakan, ketidaksetaraan pengalokasian sumber daya yang dialokasikan pemerintahan pusat ke Sudan Selatan, serta kebijakan radikal Islamisasi yang dilakukan dalam pemerintahan Jafaar Numeiri, jelas merefleksikan bahwa minat warga di Sudan Selatan untuk melanjutkan pemberontakan yang dihentikan tahun 1972 mulai kembali.

Petinggi-petinggi Anya Nya, serta kelompok gerakan pemberontak yang ada di Sudan Selatan banyak telah tersebar ke berbagai daerah di Sudan. Yang meyakini perjanjian Addis Ababa kebanyakan masuk dalam pasukan militer

nasional Sudan, dan selama beberapa tahun sejak perjanjian diterapkan, memastikan agar perjanjian tidak diingkari dan terus berjalan.

Namun beberapa kelompok yang merasa perjanjian Addis Ababa tidak memberikan jawaban atas aspirasi negara federal, serta otonomi terhadap Sudan Selatan, ternyata bersembunyi di semak-semak di daerah Sudan Selatan, bahkan sampai ke negara tetangga, Ethiopia. Salah satunya adalah Anya Nya-2. Anya Nya-2 sebelum 1980an tidak memperlihatkan eksistensinya dalam pergerakan pemberontakan, namun setelah itu mulai bergerak. Berbeda dengan Anya Nya (yang muncul pada saat perang sipil pertama Sudan), pengikut Anya Nya saat itu telah kebanyakan berada di posisi netral, dalam artian melindungi stabilitas negara, tanpa melihat adanya pihak-pihak tertentu yang mengelompokkan.

Kemungkinan perang sipil semakin menguat. Yang menjadi permasalahan bagi pihak gerilya adalah jumlah. Dimana kebanyakan pasukan Sudan Selatan saat itu melindungi perjanjian Addis Ababa. Sejak 1982, pihak pemberontak mulai melakukan komunikasi dengan pasukan Sudan Selatan tersebut. Dimana penjelasan komprehensif akan ketidakadilan pemerintahan pusat harus dihentikan. Pada tahun yang sama, 2,500 pasukan yang dahulunya netral, kembali menjadi anggota kelompok pemberontakan yang baru. Bahkan beberapa pasukan militer mulai mengunjungi markas-markas Anya Nya-2, serta kelompok pasukan gerilya lainnya di Sudan Selatan.

Dengan kasus yang sama pada perang sipil pertama Sudan di tahun 1955, pada tahun 1983, pasukan gerilya tersebut memutuskan untuk berada dalam

sebuah komando yang memnu mengintegrasikan kelompok pasukan gerilya serta

kelompok pemberontak secara keseluruhan. Terbentuk-lah SPLA/M (Southern People's Liberation Army/Movement), yang berada dalam komando John Garang. Ideologi yang muncul adalah, mereka dipersatukan atas kegagalan perjanjian Addis Ababa.

Demi mendapat jumlah pasukan yang mereka inginkan untuk pelancaran serangan, SPLA/M membentuk sebuah strategi dengan cara membuat daftar 'keluhan', yang terdiri dari kegagalan pemerintahan pusat, serta perjanjian Addis Ababa dalam menyikapi berbagai permasalahan. Dari keluhan tersebut, SPLA/M berharap bisa menemukan potensi aliansi di masa perang nantinya, serta harapan bahwa mereka bisa dipersatukan dalam sebuah komando, berdasarkan kesamaan kepentingan dalam menyikapi berbagai keluhan. Mengingat bahwa jumlah etnis yang kemungkinan akan bergabung, sangat beragam.

Beberapa keluhan yang didaftarkan adalah; intervensi pemerintah pusat pada pemilihan ketua Dewan Eksekutif, kegagalan otonomi daerah, ketidakjelasan dalam pembagian perbatasan wilayah Sudan Selatan dan Utara, pengabaian terhadap perkembangan sosio-ekonomi di Sudan Selatan, integrasi militer, mantan pasukan Anya Nya yang tidak sepenuhnya terintegrasi dalam pasukan militer saat itu, serta rencana memindahkan pasukan Any Nya ke daerah Sudan utara.²⁹

Pemerintahan Jafaar Numeiri telah memperbesar keinginan warga Sudan Selatan untuk melakukan pemberontakan melalui SPLA/M, dengan kebijakan Syariah Islam yang diterapkan saat itu. Kebijakan tersebut tidak hanya mendapat

²⁹ Douglas HJohnson, *The Root Causes of Sudan's Civil War*, Kampala: The international African institute. 2003. Hal.75.

penolakan dari mayoritas Kristen di Sudan Selatan, tetapi juga antar sesama Muslim di Sudan Utara. Namun popularitas Numeiri tidak hanya jatuh disebabkan oleh Islamisasi tersebut. Masa pemerintahan Numeiri merefleksikan masa kejatuhan ekonomi paling mengkhawatirkan di Sudan. Hingga akhirnya Jafaar Numeiri di kudeta tahun 1985.³⁰

Pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 1986, menghasilkan Sadiq Al-Mahdi sebagai Perdana Menteri.³¹ Sejak masa pemerintahan Sadiq, faktor eksternal banyak membentuk kebijakan politik dalam negerinya. Dukungan finansial, serta perangkat militer oleh Libya dan Amerika Serikat terus-menerus berlanjut. Pasukan militer Sudan berada dalam posisi yang sangat kuat, disebabkan oleh pemasukan persenjataan dan bantuan tersebut. Namun bantuan tersebut mengurangi insentif pemerintahan pusat untuk melakukan negosiasi ataupun perjanjian damai dengan pihak SPLA/M, yang disebabkan oleh persiapan militer untuk menghadapi gerakan pemberontakan apapun.

Selama pemerintahan Sudan, banyak gerakan militia/ bersenjata, yang berdasarkan pada kelompok-kelompok etnis dari Sudan Barat (Darfur). Kelompok-kelompok radikal tersebut dahulunya tidak membawa dampak yang besar terhadap stabilitas negara, namun sejak pemerintahan Sadiq, dukungan yang perangkat persenjataan yang diberikan telah meningkatkan gerakan kelompok-

³⁰*Sudan timeline*. <http://www.humanrightsfirst.org/our-work/crimes-against-humanity/sudan-timeline/>. Diunduh pada 12 Februari 2012.

³¹*Sudan-Africa Timeline of conflict*.

<http://www.learn2question.com/seevak/groups/2006/sites/Power/SP%28Africa%29/Sudan/Time>

kelompok radikal tersebut, yang biasa beroperasi di daerah Sudan Selatan, yang merupakan sumber dari SPLA/M.

The Misiriyya & Rizaiqat Baqqara Murahalin merupakan satu dari beberapa kelompok radikal yang berpengaruh saat itu. Murahalin biasa beroperasi di Sudan Selatan, melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan dan penculikan. Perdagangan perbudakan saat itu kembali muncul. Wanita dan anak-anak diculik, lalu dijual di Sudan Utara untuk menjadi budak. Adanya insentif untuk ikut serta dalam kelompok radikal tersebut, sebab masalah finansial yang melanda. Konflik yang terjadi telah mempengaruhi kestabilan ekonomi Sudan secara keseluruhan, membawa kemiskinan serta deprivasi makanan di seluruh wilayah Sudan. Perdana Menteri Sadiq menunjukkan dukungan terhadap gerakan tersebut, sebab dalam operasinya, kelompok seperti Murahalin secara langsung beradu dengan SPLA/M. keadaan tersebut telah melemahkan sistem pertahanan dari SPLA/M secara signifikan.

Kenyataan bahwa adanya kelompok yang melemahkan SPLA/M, serta adanya bantuan perangkat militer dari pihak luar tidak mengurangi insentif Sadiq untuk melakukan negosiasi, serta perjanjian perdamaian dengan pihak SPLA/M. Di tahun 1986, Sadiq melakukan negosiasi perdamaian dengan komandan, sekaligus ketua SPLA/M, John Garang.³² Sampai kepada 2 tahun negosiasi, menghasilkan beberapa prasyarat gencatan senjata. Diantaranya adalah penghapusan hukum Syariah, menghilangkan aliansi militer dengan Libya, serta Mesir, dan mengadakan konferensi pembentukan konstitusi dasar. Sadiq telah

³² Sudan - second civil war - www.globalsecurity.org/military/world/sudan-civil-war2.htm

menyetujui prasyarat yang disampaikan oleh pihak SPLA/M, dan diharapkan akan diaplikasikan pada bulan September 1989.

Negosiasi yang dilakukan oleh Sadiq ternyata menghilangkan banyak dukungannya, termasuk dari pihak militer Sudan. Komandan Omar Al-Bashiir salah satunya menentang keputusan Sadiq untuk melakukan negosiasi dengan Sudan Selatan. Pihak militer merasa bahwa negosiasi dengan SPLA/M itu tidak menjadi permasalahan, yang menjadi permasalahan adalah apabila ada prasyarat yang diajukan. Disintegrasi antara pemerintahan dan militer menyebabkan kudeta militer pada Juni 1989, yang menjatuhkan Sadiq dari posisi perdana menteri. Sejak saat itu, Omar Al-bashiir menduduki posisi tertinggi negara.³³

Masa kepemimpinan Omar Al-Bashiir tergolong keras. Omar dalam menghadapi masalah gerakan pemberontakan SPLA/M, tidak ingin melakukan rekonsiliasi dengan pihak pemberontak tersebut. SPLA/M dihadapkan dengan kekuatan militer yang terus menerus melakukan razia di berbagai daerah Sudan Selatan. Sejak tahun 1989 sampai 1990, 2000 wanita dan anak-anak diculik saat razia dilakukan, demi kepentingan bisnis perbudakan di Sudan Utara.³⁴

Keterlibatan pihak atau negara luar dalam konflik internal Sudan sangat berpengaruh dalam hal keberlangsungan, serta arah konflik yang terjadi. Mulai dari negara tetangga seperti Ethiopia, hingga Amerika Serikat, ikut berpengaruh terhadap jalannya perang sipil tersebut. Pergantian pemerintahan Sudan menghasilkan dinamika dukungan dari pihak luar. Masa pemerintahan Numeiri

³³*Sudan Civil War*. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sudanese_civil_war. Diunduh pada 11 February 2012.

³⁴*Sudan-Africa Timeline of conflict*. <http://www.africaonline.com/lgroups/2006/sites/Power/SP%28Africa%29/Sudan/Time>

Omar Al-Bashiir menunjukkan dukungannya terhadap Saddam Hussein, tindakan yang bertolak belakang dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Terhapusnya dukungan dari Amerika Serikat tidak membawa dampak yang signifikan pada berlangsungnya perang. Penyediaan persenjataan banyak disediakan oleh beberapa negara lainnya seperti Cina, Iran, Yemen, Afrika Selatan dan negara-negara bekas blok Uni Soviet seperti Kazakhstan. Perdagangan ekspor oli antar Sudan dan Rusia juga ikut serta dalam kontribusi penyediaan perangkat militer bagi Sudan.

Masa pemerintahan Omar Al-Bashiir sangat terbuka terhadap kelompok teroris internasional, Al-Qaeda. Tahun 1991, Osama Bin Laden dan kelompok Al-Qaeda pindah ke Sudan, untuk mulai merencanakan penyerangan di luar. Osama Bin Laden pada saat itu mulai membangun markas besar di Khartoum, Sudan (Ibukota Sudan).³⁵ Sejak saat itu, tindakan terorisme pertama Al-Qaeda mulai digencarkan. Penyerangan pasukan militer di Somalia, serta pembentukan jaringan dengan kelompok radikal lainnya di sekitaran Afrika merupakan tindakan-tindakan terorisme Al-Qaeda pertama yang dilakukan. Mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat dan Arab Saudi, Al-Qaeda berpindah markas ke Afganistan.

Omar Al-Bashiir bukanlah satu-satunya aktor yang mendapatkan bantuan asing. SPLA/M banyak mendapatkan dukungan dari pihak luar. salah satunya dari Ethiopia. Sejak berdirinya SPLA/M di tahun 1983, Ethiopia telah berkontribusi banyak terhadap penyediaan senjata militer di SPLA/M, sehingga mempengaruhi dinamika peperangan sipil yang terjadi antara Sudan Utara dan Selatan. Mengistu

Haile Miriam, individual yang sangat berpengaruh di Ethiopia merupakan salah satu aliansi organisasi SPLA/M. Selama peperangan terjadi, Mengistu telah mengizinkan SPLA/M untuk bermarkas di Naru, dan memberikan kebebasan untuk melakukan perekrutan anggota pada warga Sudan yang mengungsi di Ethiopia.

Bantuan yang paling berpengaruh terhadap dinamika peperangan sipil kedua adalah pasokan persenjataan. Tidak selamanya SPLA/M diberikan bantuan perangkat persenjataan tanpa bayaran apapun. Namun seringkali persenjataan ini dapat di akses dengan mudah di Ethiopia. Pada tahun 1980an, Ethiopia banyak mendapatkan pasokan persenjataan (bantuan perangkat militer) oleh Uni Soviet. Sehingga persediaan persenjataan Ethiopia tergolong tak terbatas saat itu. Kerjasama yang intensif dengan Ethiopia yang saat itu dijalin oleh John Garang, banyak diamati sebagai bentuk kerjasama para Marxis. John Garang juga didukung oleh negara-negara seperti Kuba, Uganda, Chad, terutama Israel yang telah memberikan persenjataan, serta pelatihan militer kepada anggota SPLA/M.³⁶

Perubahan posisi Amerika Serikat di awal tahun 1990an memeberikan banyak manfaat bagi pihak pemberontak. Sejak perubahan tersebut, Amerika Serikat telah memberikan kontribusi bantuan perangkat militer secara tidak langsung, melalui Ethiopia dan Uganda.³⁷ Tahun 1993, Sudan dikatakan sebagai sebuah negara teroris. Meningkatkan bantuan finansial, serta militer kepada pihak oposisi, untuk menjatuhkan pemerintahan yang mendukung terorisme tersebut.

³⁶*Sudan rebels advance with new weapons from Israel.* www.ukv.edu/~clthyn2/Thyne-Sudan.pdf. Diunduh pada 12 Februari 2012.

³⁷*Global trade, local impact: Arms transfers to all sides in the Civil War in Sudan.* www.ips.org/2012/02/12/Global-trade-local-impact-arms-transfers-to-all-sides-in-the-civil-war-in-sudan/. Diunduh pada 12 Februari 2012.

Februari 1998, Amerika Serikat memberikan bantuan perangkat militer yang bernilai 20 juta US Dollar kepada pihak pemberontak.³⁸

Tidak selamanya pihak pemberontak mendapatkan perangkat militer, sehingga muncul usaha mencari sumber persenjataan alternatif lainnya. Selama perang sipil kedua, sering kali terjadi pertempuran bersenjata antar kedua belah pihak. Perangkat militer yang digunakan oleh pihak militer Sudan seringkali menjadi target pencurian oleh para pemberontak. Mulai dari kendaraan perang, tank, sampai kepada misil seringkali dicuri oleh pihak pemberontakan. Kejadian tersebut menyebabkan pertempuran yang jauh lebih berdarah dibandingkan dengan perang sipil pertama Sudan, sebab penggunaan persenjataan yang sangat kompleks.

Walaupun mendapatkan dukungan eksternal yang kuat, SPLA/M juga mengalami berbagai permasalahan secara internal selama perang sipil kedua Sudan. SPLA/M merupakan organisasi raksasa, tersebar ke seluruh wilayah Sudan Selatan dan berbagai daerah lainnya, terdiri atas etnis yang beraneka ragam dan menghadapi berbagai perbedaan ideologi. Di masa pemerintahan Omar Al-bashiir di awal tahun 1990an, terjadi perpecahan internal dalam SPLA/M. Jumlah pasukan SPLA yang semakin bertambah, dan berasal dari latar belakang yang berbeda, menyebabkan terjadinya perpecahan dan perbedaan pendapat dalam organisasi tersebut. Memberikan kesempatan kepada militer Sudan untuk memanfaatkan konflik internal yang sedang dialami.

³⁸

Beberapa masalah utama yang dihadapi SPLA/M sebagai sebuah organisasi saat itu adalah permasalahan finansial, strategi operasi militer, informasi aliansi eksternal, serta prosesi negosiasi perdamaian dikendalikan oleh beberapa individual dalam SPLA/M, sehingga masalah akuntabilitas tidak jelas. John Garang yang sulit dijangkau menambahkan masalah kohesitas unit pasukan pemberontak yang akibatnya berkurang.

Permasalahan utama dalam SPLA/M bersumber pada ketuanya, yaitu John Garang. Adanya sistem akuntabilitas yang tidak dapat dipercaya oleh para anggota merupakan permasalahan kecil dibandingkan perspektif anggota terhadap ketua SPLA/M itu sendiri. John Garang banyak dianggap sebagai seorang diktator dan melakukan kebijakan yang kontroversial. Pembentukan sistem dimana formulasi strategi dan kebijakan yang terpusat kepada beberapa orang merupakan salah satu keluhan yang beberapa anggota SPLA/M permasalahan. Kekhawatiran tersebut juga dilatarbelakangi kenyataan bahwa John Garang berasal dari sebuah kelompok etnis yang jadi mayoritas di Sudan Selatan, sehingga faktor ketakutan juga didominasi oleh beberapa anggota didalam.

Ditahun 1990-1991, mulai muncul gerakan yang mendukung kudeta John Garang. Gerakan kudeta tersebut diketuai oleh komandan senior Riek Machar, dan lam Akol.³⁹ Aspirasi mereka adalah menjatuhkan John Garang, sebab organisasi tersebut membutuhkan prosesi akuntabilitas lebih, serta demokrasi dalam sistem pembuatan kebijakan dalam organisasi SPLA/M. Rencana kudeta tersebut telah disebarluaskan kepada keseluruhan anggota SPLA/M, juga lewat

media radio demi mendapatkan banyak dukungan. Harapan kedua komandan tersebut adalah John Garang mundur dari posisinya, agar digantikan oleh mereka. Pernyataan masalah apresiasi demokrasi, serta sistem akuntabilitas yang lebih jelas merupakan argumen yang digunakan agar pendukung mereka meningkat pada saat John Garang turun.

Rencana menjatuhkan pemimpin SPLA/M saat itu dinamakan sebagai *the Nasir Command/Nasir Faction*. Seiring dengan waktu, antara tahun 1991-1994, *Nasir Faction* ini banyak mendapatkan dukungan dari sesama anggota SPLA/M. *Nasir Faction* ini bahkan melakukan peperangan dengan pasukan SPLA/M yang diketuai oleh John Garang. Terjadi degradasi kekuatan militer SPLA/M dari segi jumlah pasukan, serta penguasaan wilayah (jatuh di tangan *Nasir Faction* pada saat peperangan terjadi). Melihat potensi kekuatan *Nasir Faction*, yang mampu melakukan dampak yang besar terhadap kekuatan SPLA/M, pemerintahan Omar Al-Bashiir memberikan bantuan perangkat persenjataan kepada *Nasir Faction*. Banyak nyawa yang melayang akibat peperangan antar kedua pihak tersebut.

Nasir Faction seiring dengan waktu dikalahkan oleh kepemimpinan John Garang di SPLA/M. Namun gerakan separatis tersebut telah menghasilkan berbagai perpecahan dalam kubu SPLA/M. Walaupun gerakan tersebut tidak signifikan dengan *Nasir Faction*, gerakan tersebut membuka jalan bagi Omar Al-Bashiir untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok pemberontak tersebut.

Usaha penyelesaian konflik sering dilakukan bukan hanya oleh kedua pihak (SPLA/M dengan Omar Al-Bashiir), namun juga ada campur tangan pihak luar

Tahun 1993, pemimpin dari Ethiopia, Uganda, dan Kenya berusaha membentuk perjanjian perdamaian dan gencatan senjata antar kedua pihak, melalui organisasi IGAD (*Intergovernmental Authority for Development*).⁴⁰ Pada tahun 1994, IGAD berusaha mendorong prosesi dari deklarasi prinsip (*Declaration of Principles*) yang mengidentifikasi elemen-elemen dasar dalam pembentukan perdamaian di Sudan. Pemerintahan Sudan tidak menandatangani deklarasi tersebut pada awalnya. Menghadapi banyak kekalahan di medan perang dari SPLA/M, maka deklarasi ditandatangani pada tahun 1997.

Deklarasi tersebut bukan-lah deklarasi gencatan senjata, ataupun perjanjian mengikat yang akan mengakhiri perang. Deklarasi prinsip tahun 1994 oleh IGAD merupakan fondasi dasar, beberapa elemen penting dalam perumusan sebuah perjanjian perdamaian di masa depan. Beberapa poin inti dalam deklarasi tersebut, diantaranya adalah mengakui bahwa Sudan merupakan negara multi-etnis, sehingga membutuhkan sistem pemerintahan yang dapat menghargai kenyataan tersebut melalui implementasi pemerintahan demokratis yang menghargai perbedaan agama dan etnis. Partai-partai yang terlibat dalam konflik perlu merundingkan sebuah gencatan senjata, agar perang sipil kedua dapat dihentikan secepatnya. Pembagian sumber daya yang setara antar Sudan Selatan dan Sudan utara. Adanya konstitusi yang mengakui Hak Asasi Manusia rakyat Sudan, sehingga operasi oleh pemerintahan pusat dahulunya tidak terulang.⁴¹

⁴⁰ *A brief history of Sudan – part 3*. www.africanhistory.about.com/od/sudan/p/SudanHist3.htm. Diunduh pada 13 Februari 2012.

⁴¹ *Declaration of principles* (IGADD/IGAD). www.c-r.org/our-work/accord/sudan/key-texts-igaddop.php. Diunduh pada 13 Februari 2012.

Tahun 2002, prosesi perdamaian dibawah perlindungan IGAD mulai terlihat progress yang signifikan. Lebih tepatnya tanggal 20 Juli 2002, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik perang sipil Sudan kedua menandatangani sebuah protocol yang disebut sebagai *Machakos Protocol*, di Kenya.⁴² Disetujui sebuah kerangka umum pemerintahan. *Machakos Protocol* terdiri dari prinsip pemerintahan, proses transisi, serta struktur pemerintahan.⁴³

Dalam *Machakos Protocol*, perjanjian yang dihasilkan tidak jauh beda dengan deklarasi prinsip sebelumnya. Diantaranya memberikan hak kepada Sudan Selatan untuk menjalani sistem pemerintahan mereka sendiri, tanpa campur tangan dari Sudan utara. Memiliki hak untuk mengadakan referendum di masa yang akan mendatang, untuk menentukan bagaimana nasib Sudan Selatan nantinya. Mencari solusi yang komprehensif, serta adil dalam, dalam mengatasi masalah ekonomi sosial yang dihadapi masyarakat Sudan. Dalam proklamasi tersebut, dijelaskan lebih terinci masalah bagaimana mekanisme transisi pemerintahan, serta struktur pemerintahan Sudan di masa depan.

Tidak lama setelah itu, pada Agustus 2002, pembahasan mengenai perjanjian perdamaian dilanjutkan. Akhirnya berakhir pada penandatanganan *Memorandum of Understanding* pada 15 Oktober 2002. Tujuan penandatanganan memorandum tersebut adalah agar terjadi sebuah situasi yang damai selama prosesi negosiasi dalam proses. Memorandum tersebut berisi beberapa poin dasar seperti kedua pihak diharuskan untuk menahan posisi militer, menahan serangan

⁴²Landmark Sudanese peace agreement: Sudan government concludes with the SPLA/M "Machakos Protocol". <http://reliefweb.int/node/106448>. Diunduh pada 13 Februari 2012.

⁴³UN US. Peacekeeping operations/peacekeeping/missions/unmis/background.shtml. Diunduh

yang dilakukan pasukan militer masing-masing pihak, menahan okupasi wilayah, membekukan semua propaganda yang mungkin akan memecahkan peperangan kembali, serta menahan semua operasi pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁴

Negosiasi perdamaian terus menerus berlanjut, sampai kepada 19 November 2004. Dimana kedua pihak menandatangani sebuah deklarasi yang memberikan komitmen kepada kedua pihak untuk melakukan finalisasi Perjanjian Perdamaian Komprehensif (*Comprehensive Peace Agreement*) sebelum Desember 2004. Akhirnya pada Januari 2005, sebuah perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pemberontak di Selatan dengan pemerintahan Sudan, mengakhiri perang saudara kedua yang telah berlangsung 21 tahun. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh pemimpin SPLA, John Garang dengan Ali Osman Taha (wakil presiden Sudan). Perjanjian perdamaian komprehensif tersebut menyetujui gencatan senjata antar kedua pihak.

Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) atau biasa disebut *Naivasha Agreement* merupakan hasil dari 3 tahun negosiasi perdamaian antar kedua pihak, yang difasilitasi oleh IGAD. Perjanjian tersebut berisi beberapa hal seperti tindak lanjut dari pasukan militer setiap kubu, otonomi daerah, kekayaan minyak, isu ekonomi, administrasi, serta Hukum Islam. 6 tahun setelah pengaplikasian perjanjian tersebut, akan diputuskan kelanjutan negara Sudan Selatan melalui sebuah referendum. Rakyat Sudan akan diberikan pilihan setelah 6 tahun integrasi pemerintahan kedua pihak (yaitu Januari 2011), apakah rakyat Sudan Selatan menginginkan persatuan, atau kemerdekaan.

⁴⁴ *Machakos Sudan peace talks Memorandum of Understanding.*

sendirinya memilih, apakah mereka menginginkan otonomi daerah (tetap sebagai satu negara Sudan), atau mereka ingin merdeka dari Sudan itu sendiri, membentuk Republik Sudan Selatan. Selama 6 tahun tersebut, penghasilan dari industri minyak yang ada di wilayah Sudan Selatan, akan dibagi dua.

Permasalahan yang paling utama dalam mendapatkan kesepakatan bersama selain masalah pasukan bersenjata masing-masing pihak adalah masalah administratif, serta penerapan hukum di Sudan selama 6 tahun tersebut. Disepakati bahwa sistem administratif akan dibelah menjadi 70:30 (mayoritas pemerintahan selama pemerintahan transisi). Kepala negara akan diduduki oleh Omar Al-Bashiir, dengan John garang sebagai wakil dari kepala negara Sudan. Hukum Syariah akan tetap diterapkan di Sudan utara. Perombakan konstitusi akan dilakukan, untuk memastikan bahwa semua warga non-muslim tidak akan terikat pada Hukum Syariah yang bertolak belakang dengan kepercayaan mereka.

Sejak saat itu, perjanjian *Naivasha* diterapkan. Selama enam tahun integrasi pemerintahan SPLA/M dengan pemerintahan pusat, beberapa konflik hampir pecah. SPLA/M mengundurkan diri dari perjanjian tersebut, sebab salah satu syarat tidak dipenuhi oleh pemerintahan pusat. Sampai kepada tahun 2007, Sudan Selatan tetap tidak mengundurkan pasukan Sudan Utara dari Selatan. Walaupun sempat memanas beberapa bulan, akhirnya redam setelah pasukan Sudan Utara di Selatan ditarik kembali pada tahun 2008.

Walaupun tidak sempurna, *Comprehensive Peace Agreement/Naivasha* telah berhasil mengakhiri perang yang berlangsung selama 21 tahun, mengambil ?

juta nyawa rakyat (mayoritas kematian diakibatkan oleh kelaparan).⁴⁷ Dibandingkan dengan perang sipil pertama, ada beberapa hal yang menjadi penyebab perang sipil kedua Sudan berlangsung lebih lama, juga menelan lebih banyak korban dibandingkan perang sipil pertama.

Posisi pemerintahan Numeiri, Sadiq, dan Omar Al-Bashiir yang tidak memiliki keinginan apapun untuk menghapuskan, atau setidaknya melimitasi penerapan hukum Syariah, membuat para pemberontak memiliki alasan untuk tetap melakukan pemberontakan sampai hukum tersebut dihapuskan. Adanya dukungan oleh masyarakat lokal akan gerakan yang dilakukan SPLA/M serta kelompok pemberontakan lainnya juga ikut serta berkontribusi terhadap perpanjangan peperangan yang terjadi. Hal tersebut telah meningkatkan jumlah pasukan SPLA/M, serta akses ke berbagai daerah sebagai markas, maupun tempat peperangan yang baru.

Pada saat terjadi perpecahan internal dalam kubu SPLA/M, ikut serta berkontribusi terhadap perpanjangan konflik. Bagaimana pemerintahan Omar Al-Bashiir pandai melihat situasi, dan memberikan bantuan fasilitas kepada individu-individu yang ingin menggantikan posisi John Garang sebagai pemimpin SPLA/M. Salah satu alasan mengapa sebuah konflik terus menerus berlanjut, adalah karena adanya sumber daya yang cukup untuk melanjutkannya. Pemerintahan Sudan menemukan sebuah sumber pemasukan baru, yaitu minyak yang ditemukan tahun 1999. Bertambahnya pemasukan buat negara, mayoritas dialokasikan demi kepentingan perang sipil yang terjadi saat itu (pembelian

⁴⁷ *Historic Sudan peace Accord signed*, <http://articles.cnn.com/2005->

peralatan perang, perangkat persenjataan). Sumber pemasukan, dan pasukan perangkat militer yang baru dan tidak terbatas menyebabkan terjadinya pemikiran bahwa pemerintahan pusat tidak mungkin kalah dengan sumber daya tidak terbatas tersebut. Demi gengsi, perang sipil tersebut dilanjutkan.

Perjanjian Naivasha telah menghentikan peperangan sipil yang terjadi sejak 1955. Gencatan senjata berhasil dicapai di Sudan saat itu. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat Sudan Selatan adalah kepercayaan, apakah melalui integrasi yang disyaratkan dalam perjanjian Naivasha benar-benar dapat terjadi. Kepercayaan antar sesama rakyat Sudan merupakan suatu hal yang esensial dalam pembuatan perdamaian antar kedua pihak, mengingat bahwa perang yang berlangsung tidak singkat, dan usaha integrasi yang dilakukan sebelumnya selalu gagal. Akhirnya rakyat Sudan Selatan diberikan kesempatan untuk menentukan bagaimana nasib mereka di masa depan, melalui referendum. Apakah persatuan akan dicoba sekali lagi, atau mereka inginkan kemerdekaan dari Sudan itu sendiri.

Sebuah referendum digelar di Sudan Selatan dari 9 hingga 15 Januari 2011. Referendum ini merupakan salah satu hasil persetujuan Perjanjian Naivasha tahun 2005 antara pemerintah pusat Khartoum dan *Sudan People's Liberation Army/Movement* (SPLA/M).

Suatu referendum bersama dimaksudkan diadakan di Abyei namun ditunda

Pada 7 Februari 2011, komisi referendum memberikan hasil akhir dengan 98.83% voting menyetujui kemerdekaan Sudan Selatan.⁴⁸

E. Perjanjian-perjanjian damai antara Pemerintah Sudan dengan Sudan Selatan

1. Perjanjian pada Perang Sipil pertama

Addis Ababa Agreement

Perjanjian Addis Ababa, dinegosiasikan pada 1972 antara pemerintah dan SSLM (Southern Sudan Liberation Movement), tidak hanya membawa perdamaian kepada Sudan, namun, juga sebagai resolusi yang unik terhadap perang sipil yang belum pernah dicapai sebelumnya paska kolonisasi Afrika, memberikan sorak-sorai kepada bangsa dan para pemimpin negara ini. Selama dua belas tahun diakui oleh kedua penanda tangan utamanya: Nimaيري dan Lagu.

Adanya sumber daya alam minyak yang ditemukan oleh perusahaan Chevron menjadi pemicu utama berakhirnya perjanjian Addis Ababa dan memicu perang sipil kedua.

2. Perjanjian pada Perang Sipil Kedua

Perjanjian Naivasa atau CPA

Comprehensive Peace Agreement (CPA, Arabic: اتفاقية السلام الشامل, Ittifāqiyat al-Sālāam aš-Šaāmil) juga dikenal dengan Perjanjian Naivasha (*Naivasha Agreement*), merupakan serangkaian perjanjian puncak pada Januari 2005 yang

⁴⁸ Southern Sudanese independence referendum, 2011.

ditandatangani antara *Sudan People's Liberation Movement* (SPLM) dan Pemerintah Sudan. CPA dimaksudkan untuk mengakhiri Perang Sipil Kedua, mengembangkan demokrasi secara luas dan mengenai pembagian pendapatan menyak. Lebih jauh lagi perjanjian ini mencakup adanya jadwal dimana Sudan Selatan akan melakukan suatu referendum atas kemerdekaannya.

Proses perdamaian didukung oleh *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD), selain juga rekan kerja IGAD, suatu kongsi negara-negara pendera.

Proses yang dihasilkan dalam perjanjian (protokol) ini meliputi:

- 1) *The Machakos Protocol* (atau Bab I), ditandatangani di Machakos, Kenya pada 20 Juli 2002. Persetujuan terhadap prinsip-prinsip yang lebih luas dari pemerintahan dan penguasa
- 2) *Protokol Pembagian Kekuasaan* (Bab II), ditandatangani Naivasha, Kenya pada 26 Mei 2004
- 3) *Perjanjian mengenai Pembagian Kekuasaan* (Bab III), ditandatangani di Naivasha, Kenya pada 7 Januari 2004
- 4) *Protokol Resolusi Konflik di Wilayah Abyei* (Bab IV), ditandatangani di Naivasha, Kenya pada 26 Mei 2004
- 5) *Protokol mengenai Resolusi Konflik di Kordofan Selatan dan Negara-negara Nil Biru* (Bab V), ditandatangani di Naivasha, Kenya pada 26 Mei 2004
- 6) *Perjanjian mengenai Pengaturan Keamanan* (Bab VI),

7) *Perjanjian Gencatan Senjata dan Keamanan Permanen, Implementasi Modalitas serta Lampiran (atau Annexure I)*, ditandatangani di Naivasha, Kenya pada 30 Oktober 2004

8) *Implementasi Modalitas dan Implementasi Matrix dan Lampiran Global (atau Annexure II)*, ditandatangani di Naivasha, Kenya pada 31 Desember 2004

Perjanjian komprehensif dan final ditandatangani pada 9 Januari 2005 dan ditandai dengan permulaan implementasi aktifitas.⁴⁹

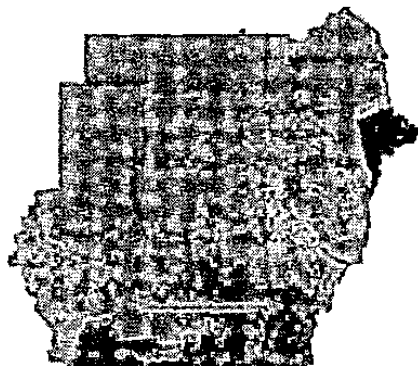
⁴⁹ *Comprehensive Peace Agreement.*

Peta Sudan



Sumber : Hizbut-Tahrir.or.id

Peta konflik Sudan



	Sudan Utara
	Darfur
	Sudan Selatan
	Front Timur
	Nuba Mountain dan Blue Nile